

## **FORUM KELOMPOK MASYARAKAT KONSERVASI TAMAN WISATA KARANG JERUK KABUPATEN TEGAL**



Kegiatan Forum Kelompok Masyarakat Konservasi Taman Wisata Karang Jeruk dilaksanakan pada tanggal 5 September 2023, di Ruang Rapat Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat. JL Bandeng, pantai Larangan. Kab. Tegal. Kegiatan dihadiri oleh 24 peserta dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng, Dinas Perikanan Kab. Tegal, Pangkalan Angkatan Laut, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti, Penyuluh Perikanan, KUB Nelayan dan Pokmaswas Kab. Tegal. Narasumber kegiatan ini dari Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang, DKP Prov Jateng dan DPRD Prov Jateng. Tujuan pertemuan ini untuk menggali peran serta Kelompok Masyarakat untuk pengelolaan Konservasi Taman Wisata Karang Jeruk Kabupaten Tegal yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan untuk Ekowisata di Pantura Jawa Tengah.

Perlindungan terhadap sumber daya alam terutama kelautan dan perikanan terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan di wilayah perairan Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan diamanatkan kepada Pengawas Perikanan. Namun disadari bahwa kuantitas dan kualitas petugas pengamanan sangat terbatas. Untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat setempat guna mendukung upaya pengawasan dan pengamanan yang selama ini dinilai belum optimal. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kelompok masyarakat sekitar kawasan yang secara sukarela berinisiatif untuk ikut berpartisipasi mengamankan kawasan konservasi perlu didukung oleh instansi Pembina dalam hal ini DKP Provinsi Jawa Tengah, DKP Kabupaten/Kota tersebut, PSDKP dan Polairud. Kelompok ini yang selanjutnya disebut dengan



Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) memiliki struktur organisasinya masing-masing yang ditetapkan oleh SK Kepala Dinas DKP Provinsi Jawa Tengah dan PSDKP untuk Pokmaswas.

Partisipasi masyarakat diperlukan dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan tahap evaluasi. Karena masyarakat pesisir terutama nelayan sebagai pelaku yang pertama merasakan dampak dari degradasi lingkungan kawasan pesisir. Pengelolaan kawasan konservasi perairan harus mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, dukungan negara dan pemerintah daerah sangat diperlukan. Kawasan pantura Jawa Tengah memiliki potensi pengembangan ekonomi, khususnya Ekonomi Biru (Blue Economy), yang sangat menjanjikan, antara lain dengan pengembangan UMKM dan ekowisata berbasis kelautan. Penerapan pengamanan dan pengawasan partisipatis pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam konsep Siskamswarkarsa atau Sismaswas. Oleh sebab itu penerapannya tidak harus melalui penciptaan konsep yang baru, melainkan lebih mengutamakan pengembangan sistem yang sudah ada yang disesuaikan dengan kondisi terkini dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan dan pengawasan modern.

*Bidang Perikanan Tangkap  
Dinas Perikanan Kabupaten Tegal  
©2023*

